



PENGARUH INFLASI, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PRODUCT DOMESTIC REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP UPAH MINIMUM DI PULAU JAWA TAHUN 2015-2019

Widya Meinita¹, Saparuddin Mukhtar², Ari Saptono³,
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Email: Widyameinita2017@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of inflation, Education Level, Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the Minimum Wage. The data used in each variable uses secondary data, namely inflation rate, average length of schooling, gross regional domestic product and provincial minimum wages from provinces in Java, namely Banten, DKI Jakarta, West Java, Central Java, D.I. Yogyakarta and Java. East for 5 years from 2015-2019. The data analysis technique used regression analysis using the Fixed Effect Model. The results showed that the level of education and gross domestic product had a positive and significant effect on the provincial minimum wage. While the level of work participation has a positive and insignificant effect on the provincial minimum wage.

Keywords: Minimum Wage, Inflation, Level of Education, Product Domestic Regional Bruto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Tingkat Pendidikan, *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) Terhadap Upah Minimum. Data yang digunakan pada tiap variabel menggunakan data sekunder yaitu tingkat inflasi, rata-rata lama sekolah, *product domestic regional bruto* dan upah minimum provinsi dari provinsi di Pulau Jawa yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur selama 5 tahun dari tahun 2015-2019. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi dengan menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan *product domestic regional bruto* berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap upah minimum provinsi.

Kata Kunci: Upah Minimum, Inflasi, Tingkat Pendidikan, *Product domestic regional bruto*

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusianya baik itu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam dunia ketenagakerjaan, menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Nomor 2 “Tenaga kerja merupakan setiap orang yang akan melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa” (DPR, 2003). Tenaga kerja (*labor*) menjadi bagian dari faktor produksi yang memiliki peranan penting dalam menjalankan suatu mekanisme produksi. Memasuki era modern ini, dalam dunia ketenagakerjaan mengalami tantangan yang semakin besar, persaingan antar dunia usaha yang semakin sulit, perkembangan teknologi yang berkembang cepat yang dapat memudahkan segala hal mengakibatkan juga persaingan permintaan dan penawaran tenaga kerja yang semakin selektif. Yang menimbulkan berbagai macam permasalahan di bidang ketenagakerjaan.

Salah satu permasalahan terkait di bidang ketenagakerjaan menyangkut masalah upah. Upah merupakan hak bagi pekerja atau buruh sebagai imbalan atau penghasilan atas pekerjaan yang telah dilakukan yang diberikan oleh pemberi kerja. Para pekerja/buruh sangat bergantung dengan upah yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan kebutuhan yang lainnya.

Di satu sisi pekerja selalu mengharapkan pemberian upah yang lebih baik. Tetapi bagi perusahaan, memandang upah sebagai komponen biaya (*cost*) yang cukup besar untuk dikeluarkan dan dapat mengurangi keuntungan atau laba yang dihasilkan. Sehingga beberapa perusahaan sering kali dalam pemberian upah tergolong rendah di bawah rata-rata untuk menekan biaya yang dikeluarkan. Dalam menangani permasalahan pengupahan sangat krusial

Dalam menangani permasalahan pengupahan sangat krusial tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya unjuk rasa oleh pekerja. Fenomena tersebut dapat diketahui dari banyaknya pemberitaan mengenai adanya sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa aliansi buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan aliansi buruh lainnya.

Upaya dalam menangani permasalahan perbedaan kepentingan antara pihak pekerja dan perusahaan, pemerintah melakukan penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum bertujuan meningkatkan taraf hidup para pekerja/buruh sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Dalam penetapan upah minimum menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 2 sebagai berikut “Upah minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas (inflasi) dan pertumbuhan ekonomi” (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, 2018).

Di Indonesia, setiap provinsi menetapkan upah minimum yang berbeda-beda. Tetapi kenyataannya, masih ada provinsi yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dibawah dari nilai rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) Nasional. Salah satu contoh di pulau Jawa juga melakukan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sebagian besar provinsi di pulau Jawa menetapkan upah minimum dibawah UMP Nasional kecuali provinsi DKI Jakarta. Berikut besaran upah minimum 5 provinsi yang ada di pulau Jawa dari tahun 2015-2019.

Tabel 1 Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2015-2019 (Dalam Rupiah)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
Banten	1.600.000	1.784.000	1.931.180	2.099.385	2.267.990
DKI Jakarta	2.700.000	3.100.000	3.355.750	3.648.035	3.940.973
Jawa Barat	1.000.000	1.312.355	1.420.624	1.544.360	1.668.372
Jawa Tengah	910.000	1.265.000	1.367.000	1.486.065	1.605.396
D.I. Yogyakarta	988.500	1.182.510	1.337.645	1.454.154	1.570.923
Jawa Timur	1.000.000	1.283.000	1.388.000	1.508.895	1.630.059

Sumber: *Badan Pusat Statistik 2015-2019*

Berdasarkan data dari Tabel 1 menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terletak di pulau Jawa mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dalam penetapan upah minimum, pemerintah mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kebutuhan Hidup Layak (KHL) saat ini terdiri dari 64 komponen. Di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti komponen makanan dan minuman, komponen sandang, komponen perumahan, komponen pendidikan, komponen kesehatan, komponen transportasi dan komponen rekreasi.

Pada kenyataannya, masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara upah yang diberikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja. Dilansir dari (Budiman, 2020) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pemberlakuan peraturan menteri ketenagakerjaan yang menetapkan komponen KHL menjadi 64 komponen. Meski item komponen bertambah, buruh tetap miskin. Dari perhitungan adanya kualitas komponen yang turun sehingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta penambahan 84 item KHL sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup layak.

Tentunya dalam penetapan upah minimum memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang tidak mudah diterapkan. Dalam penetapan tingkatan upah didasarkan kepada sejumlah fungsi antara lain untuk menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan menjadi insentif untuk

mendorong peningkatan produktivitas pekerja (Izzaty & Sari, 2013). Maka dari itu, penentuan upah minimum yang sudah ada kurang tepat jika hanya didasarkan pada indikator tersebut, sehingga memerlukan sejumlah indikator lain seperti tingkat inflasi dan tingkat pendidikan.

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus – menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan nilai uang. Menurut Boediono (1985:161) dalam (Azis & Wibowo, 2016) mengatakan bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga umum menaik secara umum dan terus menerus atau suatu keadaan dimana senantiasa turunnya nilai uang. Ada 3 komponen yang dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu adanya kecenderungan harga-harga meningkat, kenaikan harga tersebut berlangsung secara terus- menerus dan yang terakhir tingkat harga mengalami kenaikan bukan hanya satu komoditi saja, melainkan harga barang secara umum.

Tabel 2 Tingkat Inflasi Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015- 2019 dalam persen (%)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
Banten	4.29	2.94	3.98	3.42	3.30
DKI Jakarta	3.30	2.37	3.72	3.27	3.23
Jawa Barat	2.73	2.75	3.63	3.54	3.21
Jawa Tengah	2.73	2.36	3.71	2.82	2.81
D.I. Yogyakarta	3.09	2.29	4.20	2.66	2.77
Jawa Timur	3.08	2.72	4.04	2.86	2.12

Sumber: *Badan Pusat Statistik 2015-2019*

Berdasarkan data dari Tabel 2 mengenai Tingkat inflasi di provinsi Pulau Jawa mengalami perkembangan yang fluktuasi dari setiap tahunnya. Salah satu laju inflasi tertinggi terjadi di provinsi banten tahun 2015 sebesar 4.29%, sedangkan inflasi terendah terjadi di provinsi jawa timur pada tahun 2019 sebesar 2.12%. Inflasi sendiri merupakan salah satu masalah penting dalam perekonomian. Tinggi rendahnya tingkat inflasi dapat dipicu dari daya beli masyarakat itu sendiri mencerminkan kondisi keseimbangan pasar yaitu permintaan dan penawaran. Apabila jumlah penawaran barang di pasar berlebih atau sebaliknya maka kondisi ketidakseimbangan akan terjadi, yang akhirnya memicu terjadinya inflasi.

Selain tingkat inflasi, tentu tingkat pendidikan juga akan menjadi indikator dalam penentuan upah tenaga kerja. Tingkat pendidikan menjadi salah satu indikator untuk melihat kualitas tenaga kerja yang tersedia. Tentu tingkat pendidikan menjadi tolak ukur melihat kemampuan seseorang, seberapa besar efisiensi & efektifitas tenaga kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki. Seseorang yang berpendidikan tentu akan mempengaruhi pola pikir, sikap, maupun perilakunya.

Menurut Rozman Himaz yang dikutip oleh Astriana Widyastuti mengatakan bahwa “Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula, karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan melalui kualitas kerja” (Widyastuti, 2012). Pendidikan bagi tenaga kerja menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja. Tentu tingkat pendidikan memiliki keterkaitan dengan produktivitas serta kemampuan seseorang.

Menurut Becker (1993:29) dikutip oleh Ratna Juwita dan Retno Budi Lestari mengatakan “Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan investasi yang meningkatkan keahlian (*investment in human capital*)” (Ratna Juwita, 2013). Semakin tinggi *human capital* yang dicapai oleh seseorang maka semakin besar mereka menghasilkan barang dan jasa. *Human capital* tentu membutuhkan suatu proses kegiatan investasi melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi pasar tenaga kerja yang mengalami pergeseran permintaan tenaga kerja tidak terdidik menjadi tenaga kerja terdidik

akibat industrialisasi. Tentunya, perusahaan- perusahaan menginginkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan serta kemampuan khusus. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik akan membawa dampak terhadap produksi yang dihasilkan. Tenaga kerja yang mampu bekerja serta memiliki produktivitas yang tinggi akan mampu menghasilkan produk (*output*) yang lebih banyak, secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam sistem pengupahan untuk tenaga kerja.

Penetapan besar kecilnya upah juga mengacu pada nilai tambah yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Nilai tambah yang dimaksud disini yaitu jumlah produk (*output*) yang dihasilkan. Jumlah *output* yang meningkat akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) adalah jumlah nilai tambah baik barang dan jasa yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Kenaikan dan penurunan nilai *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) mencerminkan proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah (Rahman & Hadi, 2016).

Tabel 3 *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) dalam Milyar

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
Banten	368,377.20	387,835.09	410,137.00	433,782.71	458,620.71
DKI Jakarta	1,454,563.85	1,539,916.88	1,635,359.15	1,735,208.05	1,836,240.55
Jawa Barat	1,207,232.34	1,275,619.24	1,343,662.14	1,491,624.14	1,490,959.69
Jawa Tengah	806,765.09	849,099.35	893,750.30	941,091.12	991,516.54
D.I. Yogyakarta	83,474.45	87,685.81	92,300.24	98,024.01	104,485.46
Jawa Timur	1,331,376.10	1,405,563.51	1,482,299.58	1,563,441.82	1,649,895.64

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015-2019

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) di setiap provinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) di pulau jawa yang memiliki nilai PDRB tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 1.838.500,81 (milyar) pada tahun 2019 dan provinsi D.I. Yogyakarta memiliki nilai *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) terendah di pulau Jawa mencapai 104.489,71 (milyar) pada tahun 2019.

Peran nilai *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) menjadi sangat penting dalam mengukur perekonomian dan seberapa besar produksi barang dan jasa yang di hasilkan di suatu daerah tersebut. Kenaikan dan penurunan produksi barang dan jasa yang dihasilkan juga mempengaruhi faktor dalam menentukan upah minimum di suatu daerah. Semakin tinggi produksi barang dan jasa yang dihasilkan maka semakin tinggi juga nilai *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) yang dihasilkan di daerah tersebut. Sehingga, ketika produksi yang dihasilkan tinggi akan meningkatkan nilai PDRB di suatu daerah secara tidak langsung akan mencerminkan naiknya pendapatan masyarakat tersebut. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak provinsi di Indonesia khususnya di pulau jawa yang nilai *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) nya tinggi tetapi pendapatan atau upah yang diterima masyarakat di bawah upah minimum nasional.

Berdasarkan beberapa fakta yang telah dipaparkan dan permasalahan yang ada, dapat dilihat bahwa faktanya dalam penentuan upah minimum hanya berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi saja. Namun ada faktor – faktor- faktor lain, seperti tingkat inflasi dan tingkat pendidikan yang mempengaruhi upah minimum. Maka dari itu perlunya dikaji lebih lanjut apakah variabel – variabel tersebut akan

berpengaruh atau tidak terhadap upah minimum. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi, Tingkat Pendidikan dan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) Terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa pada Tahun 2015-2019”.

KAJIAN PUSTAKA

Upah Minimum

Upah merupakan hak bagi pekerja atau buruh sebagai imbalan atau penghasilan atas pekerjaan yang telah dilakukan yang diberikan oleh pemberi kerja. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan : “Upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan” (Kementerian Ketenagakerjaan, 2003). Pendapat lain oleh Sadono Sukirno mengatakan bahwa upah yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha (Sukirno, 2002). Selanjutnya menurut G. Reynold upah adalah jumlah uang yang diterima tenaga kerja, pada waktu tertentu. Lebih penting lagi, upah adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat ia beli dari jumlah upah itu (Trimaya, 2014).

Upah Minimum merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan melindungi pekerja/buruh dan mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terdapat perubahan menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 mengenai Upah Minimum mendefinisikan sebagai “Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman”(Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, 2018).

Teori upah efisiensi (*efficiency wage*) yang dikemukakan oleh Cafferty (1990) dalam (Mankiw, 2006) mengatakan bahwa upah yang tinggi dan memadai memungkinkan para pekerja lebih produktif. Teori upah efisiensi juga memprediksi bahwa apabila para pekerja mendapatkan upah yang memadai maka dia dapat memenuhi nutrisi atau kebutuhan fisik minimum hidupnya. Sehingga dengan demikian apabila kebutuhan fisik minimum para pekerja sudah terpenuhi maka secara tidak langsung pekerja mampu bekerja secara maksimal. Teori upah efisiensi ini juga menyebutkan bahwa dalam penetapan upah minimum dengan memperhatikan kebutuhan fisik minimumnya sehingga dalam jangka panjang mampu meningkatkan produktivitas para pekerja. Dampak secara ekonomi, dengan tingginya produktivitas pekerja pada akhirnya akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada negara-negara berkembang menerapkan upah efisiensi untuk memungkinkan para pekerja mampu memenuhi kebutuhan nutrisi sehingga bekerja lebih keras dan produktif. Di Indonesia, kebijakan penentuan upah minimum didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 prinsipnya adalah bahwa setiap warga negara indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan nilai uang. Menurut Boediono (1985:161) dalam (Azis & Wibowo, 2016) mengatakan bahwa inflasi

adalah kecenderungan dari harga umum menaik secara umum dan terus menerus atau suatu keadaan dimana senantiasa turunnya nilai uang.

Hal sama juga dikatakan oleh (Kuncoro, 1998) berpendapat bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Hal ini juga didukung oleh (Nanga, 2001) ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, komponen tersebut yaitu :

- a. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan tendensi yang meningkat.
- b. Bahwa kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus menerus (*sustained*), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya.
- c. Bahwa tingkat harga yang dimaksud disini adalah tingkat harga secara umum, yang berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga barang secara umum.

Berdasarkan pengertian serta pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, inflasi adalah suatu kondisi perekonomian dimana mengalami kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus- menerus dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Pada dasarnya inflasi memiliki hubungan dalam penentuan upah itu sendiri. Dalam (Sukirno, 2019) *Cost Push Inflation* merupakan teori yang menjelaskan bahwa adanya hubungan antara inflasi dengan upah. *Cost Push Inflation* merupakan inflasi dengan di tandai kenaikan harga yang disebabkan adanya kenaikan biaya produksi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran agregat (Aggregate Supply), sebagai kenaikan produksi.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan yaitu berasal dari bahasa Yunani kata "*padagogik*" yang memiliki arti ilmu menuntun anak. Jika diartikan lebih mendalam yaitu suatu proses mendorong serta membantu anak untuk dapat mengembangkan suatu potensi yang tertanam di dirinya untuk menjadi individu yang lebih matang. Pendidikan adalah salah satu usaha mengembangkan kemampuan individu untuk menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam (Nurkholis, 2013) pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuh jiwa raga anak didik agar dalam garis- garis kodrat pribadinya agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Menurut Edgar Dalle dalam (Aas Siti Sholichah, 2018) berpendapat pendidikan sebagai usaha yang dilakukan baik individu, keluarga maupun masyarakat untuk dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan tujuan untuk mempersiapkan individu di masa yang akan mendatang. Selanjutnya menurut Muhmammad Ichsan memakni pendidikan sebagai suatu proses untuk memperoleh wawasan, pemahaman, serta bertingkah laku sesuai di lingkungan masyarakat. Kemampuan tersebut didapat dari kecerdasan intelektual maupun sikap individu yang diasah untuk mencapai tujuan hidup yang lebih sejahtera (Ichsan, 2016).

Berdasarkan pendapat- pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha dalam meningkatkan, menambah, dan mengembangkan wawasan serta kemampuan yang dimiliki untuk menjadi individu yang lebih matang dengan melalui proses pembelajaran guna membentuk pribadi yang semakin utuh lahir batin dan mampu hidup dilingkungan masyarakat.

Human capital merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas di suatu negara. Konsep human capital dalam (Nurkholis, 2016) di perkenalkan oleh Theodore Schultsz lewat pidato yang berjudul “*Investment in Human Capital*” pada tahun 1960. Sebelumnya, para ekonom hanya mengenal kapital fisik berupa alat-alat, mesin dan peralatan produktif lainnya yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Melalui gagasan Schultsz “*Investment in Human Capital*” adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan sekedar sebagai kegiatan konsumtif, melainkan suatu bentuk investasi sumber daya manusia (SDM). Pendidikan merupakan modal manusia yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan sebagai suatu sarana pengembangan kualitas manusia, memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa rill terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Adanya pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup masyarakat yang lebih tinggi (Sukirno, 2016). Untuk mengetahui adanya pertumbuhan ekonomi disuatu negara, maka diperlukan suatu indikator. Salah satu indikator yang dapat mengukur adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu *Product Domestic Bruto* (PDB) untuk skala nasional atau *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) untuk skala daerah. *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh faktor perekonomian di suatu wilayah. *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) juga bisa dikatakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. *Product Domestic Regional*

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menghitung *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) dengan menggunakan pertambahan nilai output. Berdasarkan teori fungsi produksi yaitu

$$Q = F (K, L)$$

Keterangan:

Q = Tingkat Output

K = Barang Modal

L = Labor/ tenaga kerja

Berdasarkan fungsi produksi tersebut peningkatan modal maupun tenaga kerja akan mendorong peningkatan output. Sehingga dengan adanya peningkatan output akan mempengaruhi besaran *product domestic regional bruto* di suatu daerah tersebut dan secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat hasil penelitian (Ninda Noviani Charysa, 2013) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan penetapan upah minimum. Ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan berdampak pada penetapan upah minimum yang mengalami peningkatan pula.

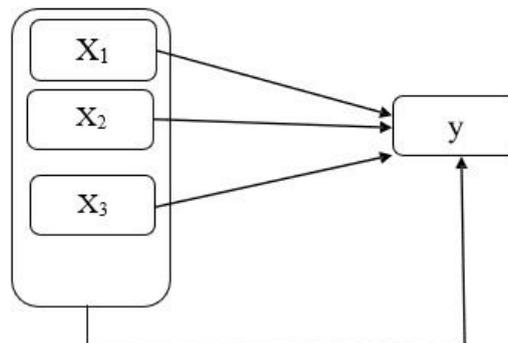
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode regresi data panel dengan pendekatan korelasional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder merupakan data dalam bentuk yang sudah jadi atau berupa data publikasi. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang

menjadi objek penelitian. Dimana Upah Minimum Provinsi merupakan variabel terikat (Y) sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Inflasi (X₁), Tingkat Pendidikan (X₂), dan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) (X₃). Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh antara Inflasi, Tingkat Pendidikan, *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur) pada tahun 2015-2019.

Konstelasi Hubungan Antar Variabel

Maka konstelasi hubungan antar variabel sebagai berikut:



Gambar Konstelasi Variabel

Keterangan:

- X₁ = Inflasi
- X₂ = Tingkat Pendidikan
- X₃ = Product Domestic Regional Bruto (PDRB)
- Y = Upah Minimum Provinsi (UMP)
- > = Arah pengaruh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui uji regresi linier berganda dengan menggunakan Eviews 12 maka diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 4 Hasil Estimasi Regresi Model Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6171868.	1687303.	-3.657831	0.0015
INFLASI	79799.32	37658.36	2.119033	0.0462
PEND	650222.9	203035.8	3.202505	0.0043
PDRB	1.917799	0.358399	5.351019	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.984245	Mean dependent var	1778339.	
Adjusted R-squared	0.978243	S.D. dependent var	796422.4	
S.E. of regression	117474.0	Akaike info criterion	26.42915	
Sum squared resid	2.90E+11	Schwarz criterion	26.84951	
Log likelihood	-387.4372	Hannan-Quinn criter.	26.56362	
F-statistic	163.9890	Durbin-Watson stat	1.418174	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada Tabel 4.1 maka diperoleh model regresi sebagai berikut :

$$UMP = -6171868 + 79799.32INFLASI + 650222.9PEND + 1.917799PDRB + e$$

Berdasarkan persamaan regresi data panel diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Jika diasumsikan nilai dari variabel X_1 (Inflasi), X_2 (Tingkat Pendidikan), dan X_3 (PDRB), adalah konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel Y (UMP) menurun sebesar - 6171868
2. Koefisien regresi pada variabel Inflasi sebesar 79799.32 dan positif artinya jika variabel Inflasi mengalami kenaikan sebesar 1% secara signifikan, dan variabel lainnya bernilai tetap. Maka variabel Inflasi akan meningkatkan nilai dari variabel UMP sebesar 79799.32
3. Koefisien regresi pada variabel Tingkat Pendidikan sebesar 650222.9 dan positif artinya jika variabel Tingkat Pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1% secara signifikan, dan variabel lainnya bernilai tetap. Maka variabel Tingkat Pendidikan akan meningkatkan nilai dari variabel UMP sebesar 650222.9
4. Koefisien regresi pada variabel PDRB sebesar 1.917799 dan positif artinya jika variabel PDRB mengalami kenaikan sebesar 1% secara signifikan, dan variabel lainnya bernilai tetap. Maka variabel PDRB akan meningkatkan nilai dari variabel UMP sebesar 1.917799.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi

Berdasarkan hasil estimasi model menunjukkan bahwa untuk tingkat inflasi memiliki pengaruh positif dengan angka koefisien sebesar 79799.32 dan didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 2.119033 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1.70526. Selain itu nilai probabilitas sebesar 0.0462, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi. Sesuai dengan teoritik *Cost Push Inflation* dalam (Sukirno, 2019) mengenai *cost push inflation* yaitu merupakan teori yang menjelaskan bahwa adanya hubungan antara inflasi dengan upah. *Cost Push Inflation* merupakan inflasi dengan di tandai kenaikan harga yang disebabkan adanya kenaikan biaya produksi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran agregat (Aggregate Supply), sebagai kenaikan produksi. Pada saat biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh produsen meningkat. Maka produsen akan mengurangi jumlah barang yang diproduksi sebagai akibat dari meningkatnya biaya produksi. Apabila keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka terjadilah inflasi yang disertai dengan resesi. Inflasi juga menjadi salah satu indikator guna melihat daya beli masyarakat karena dapat mencerminkan kondisi keseimbangan pasar secara langsung. Apabila jumlah supply barang di pasar berlebih sementara permintaan masyarakat tetap atau bahkan turun, maka ketidakseimbangan akan terjadi. Penurunan daya beli ini tentu saja berbahaya bagi perekonomian. Dampak akhirnya adalah turunya nilai tambah perekonomian bahkan memperlambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Upah Minimum Provinsi

Berdasarkan hasil estimasi model menunjukkan bahwa untuk tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dengan angka koefisien sebesar 650222.9 dan didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 3.202505 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1.70526. Selain itu nilai probabilitas sebesar 0.0043, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.05. Berdasarkan nilai koefisien dan hasil uji t dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi di provinsi Pulau Jawa tahun 2015-2019.

Teori *Human Capital* dalam (Nurkholis, 2016) di perkenalkan oleh Theodore Schultz lewat pidato yang berjudul "*Investment in Human Capital*" pada tahun 1960. Melalui gagasan Schultz "*Investment in Human Capital*" adalah bahwa proses perolehan

pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan sekedar sebagai kegiatan konsumtif, melainkan suatu bentuk investasi sumber daya manusia (SDM). Pendidikan sebagai suatu sarana pengembangan kualitas manusia, memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Miswar, 2018) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja di Aceh. Hasil estimasi menunjukkan p-value sebesar 0.000, dengan demikian p-value ($0.000 < 0.05$) yang artinya tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat upah. Lamanya tingkat pendidikan seseorang maka akan meningkatkan nilai upah yang akan diterimanya.

3. Pengaruh Product Domestic Regional Bruto terhadap Upah Minimum Provinsi

Berdasarkan hasil estimasi model menunjukkan bahwa untuk *product domestic regional bruto* memiliki pengaruh positif dengan angka koefisien sebesar 1.917799 dan didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 5.351019 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1.70526. Selain itu nilai probabilitas sebesar 0.000, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.05. Berdasarkan nilai koefisien dan hasil uji t dapat dikatakan bahwa *product domestic regional bruto* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi di provinsi Pulau Jawa tahun 2015-2019.

Secara teoritik mengenai fungsi produksi neo klasik dimana mengasumsikan suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara input sebagai faktor produksi dan output sebagai hasil produksi. Fungsi produksi ini di rumuskan dengan $Q = (L, C)$. Dengan Q sebagai output atau jumlah hasil produksi, L sebagai Labour atau tenaga kerja, dan C sebagai Capital atau modal. Berdasarkan fungsi produksi tersebut peningkatan modal maupun tenaga kerja akan mendorong peningkatan output. Sehingga dengan adanya peningkatan output akan mempengaruhi besaran *product domestic regional bruto* di suatu daerah tersebut dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan individu.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ninda Noviani Charysa, 2013) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil estimasi menunjukkan koefisien sebesar 2.180914 dengan nilai p-value sebesar 0.03 dengan demikian p-value ($0.000 < 0.05$) yang artinya *product domestic regional bruto* berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum regional. Ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan berdampak pada penetapan upah minimum yang mengalami peningkatan pula.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan pada Provinsi di Pulau Jawa selama 5 periode yakni dari tahun 2015-2019 berfokus pada pengaruh Inflasi, Tingkat pendidikan, dan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi. Berdasarkan pembahasan hasil analisis bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Inflasi berdasarkan analisis regresi dengan menggunakan uji t secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi di provinsi Pulau Jawa tahun 2015-2019.
2. Tingkat Pendidikan berdasarkan analisis regresi dengan menggunakan uji t secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi di provinsi Pulau Jawa tahun 2015-2019.
3. *Product Domestic Regional Bruto* berdasarkan analisis regresi dengan menggunakan uji t secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi di provinsi Pulau Jawa tahun 2015-2019.

4. Inflasi, Tingkat Pendidikan, dan *Product Domestic Regional Bruto (PDRB)* memiliki pengaruh dan signifikan secara bersama-sama terhadap Upah Minimum Provinsi di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2015-2019. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien determinasi R-squared 0.978243 yang artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 97.82%

REKOMENDASI

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Karena banyaknya faktor-faktor lain yang mempengaruhi upah minimum provinsi, penelitian selanjutnya bisa lebih mengeksplor variabel lain seperti kebutuhan hidup layak, jumlah penduduk maupun dari produktivitas pekerja baik itu secara pengalaman kerja
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih panjang dengan periode terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aas Siti Sholichah. (2018). Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur'an. *Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id*, 07(1), 23–46. <https://doi.org/10.30868/EI.V7>
- Azis, M. K., & Wibowo, M. G. (2016). Kausalitas Upah Minimum Regional Dengan Laju Inflasi Di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, 9(1), 1–9. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=626464&val=6470&title = PENGARUH INFLASI NILAI TUKAR RUPIAH DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=626464&val=6470&title=PENGARUH%20INFLASI%20NILAI%20TUKAR%20RUPIAH%20DAN%20JUMLAH%20PENGUSAHA%20KENA%20PAJAK%20TERHADAP%20PENERIMAAN%20PAJAK%20PERTAMBAHAN%20NILAI) Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
- DPR. (2003). *Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Dpr.Go.Id. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/196.pdf>
- Ichsan, M. (2016). Psikologi Pendidikan Dan Ilmu Mengajar. *Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id*, 2(1), 60. <https://doi.org/10.22373/je.v2i1.691>
- Izzaty, & Sari, R. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia (The Minimum Wage Policy in Indonesia). *Jurnal.Dpr.Go.Id*, 4(2), 1–15. <http://wartaekonomi.co.id/berita7450/perburuhan-menjaga-keseimbangan-upahdan-produktivitas-bagian-ii.html>
- Kuncoro, M. (1998). *Metode Kuantitatif Teori & aplikasi Untuk Bisnis & Ekonomi*. YKPN.
- Mankiw, G. (2006). Macroeconomics edition 6. In *Macroeconomics edition 6* (6th ed., pp. 164–165). Erlangga.
- Miswar. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja Di Aceh. *Garuda.Ristekbrin.Go.Id*, 5(1), 1–18. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1071085>
- Nanga, M. (2001). *Makroekonomi, Edisi 1*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ninda Noviani Charysa. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. *Journal.Unnes.Ac.Id*, 2(4), 1–9. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.2489>
- Nurkholis, A. (2016). Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory. *Osf.Io*, 1–16. [https://osf.io/preprints/inarxiv/8trv7/download#:~:text=Human capital theory menggunakan konsep,memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia.](https://osf.io/preprints/inarxiv/8trv7/download#:~:text=Human%20capital%20theory%20menggunakan%20konsep,memperbesar%20pilihan-pilihan%20bagi%20manusia.)
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri*

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum.
<https://jdih.kemnaker.go.id/pengupahan.html>

- Rahman, ahmad jazuli, & Hadi, S. (2016). Pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja terhadap PDRB kota/kabupaten di provinsi banten tahun 2010-2014. *Ejournal.Umm.Ac.Id*, 14(02). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3890/4311>
- Ratna Juwita, R. B. L. (2013). Kontribusi Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Sektoral Di Kota Palembang. *Core.Ac.Uk*, 2(2), 149–164. <https://core.ac.uk/download/pdf/35318874.pdf>
- Sukirno, S. (2019). *Teori Pengantar Makroekonomi Edisi ke 3 (ke 3)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Trimaya, A. (2014). Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Jurnal.Dpr.Go.Id*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.448>
- Widyastuti, aстриana. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Journal.Unnes.Ac.Id*, 1. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/472>